

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Partisipasi Masyarakat

2.1.1.1 Pengertian Partisipasi Masyarakat

Partisipasi berasal dari kata “*participation*” yang memiliki arti sebuah kegiatan dalam hal membangkitkan perasaan yang diikuti oleh organisasi tertentu. Menurut Simatupang dalam Yuwono, (2001,hlm.124) memberikan beberapa rincian tentang partisipasi sebagai berikut :

- a. Partisipasi artinya apa yang dilakukan merupakan bagian dari usaha dalam hal gotong royong untuk masyarakat yang sebangsa dan setanah air
- b. Partisipasi artinya sebagai sebuah pekerjaan untuk meperoleh tujuan bersama diantara seluruh warga negara dengan latar belakang kepercayaan yang bermacam-maccam dengan hak dan kewajiban yang sama
- c. Partisipasi tidak hanya diartikan sebagai pengambilan dari bagian pada pelaksanaan dan perencanaan pembangunan namun memberikan sumbangan agara nilai kemanusiaan dan nilai pancasila tetap dijunjung tinggi.

Menurut Slamet dalam Suryono (2001,hlm.124) partisipasi masyarakat dalam pembangunan diartikan sebagai ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan pembangunan dan ikut serta memanfaatkan dan ikut menikmati hasil-hasil pembangunan. Supriadi (2005,hlm.16) menuturkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan memiliki arti keikutsertaan masyarakat yang efektif membutuhkan kekosongan dari partisipasi masyarakat merupakan pernyataan yang salah. Slamet (2003,hlm.8) menyatakan bahwa, partisipasi Valderama dalam Arsito mencatat ada tiga tradisi konsep partisipasi terutama bila dikaitkan dengan pembangunan masyarakat yang demokratis yaitu :

- a. Partisipasi politik, memiliki orientasi pada hal mempengaruhi serta mendudukan wakil rakyat dalam lembaga pemerintah.
- b. Partisipasi sosial merupakan partisipasi yang ditetapkan sebagaai sebuah proses pembangunan dalam konsultasi maupun mengambil sebuah keputusan untuk seluruh tahapan proyek pembangunan dari evaluasi kebutuhan.

- c. Partisipasi warga ini memberikan penekanan pada partisipasi langsung warga untuk mengambil keputusan pada proses pemerintahan.

2.1.1.2 Jenis Partisipasi Masyarakat

Klasifikasi partisipasi berdasarkan cara keterlibatannya oleh Sundariningrum dalam Sugiyah (2010,hlm.38) dibagi menjadi dua yaitu partisipasi langsung dan tidak langsung.

a. Partisipasi langsung

Partisipasi langsung adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu dengan melakukan kegiatan tertentu. Partisipasi langsung dapat berupa pengajuan pendapat dan gagasan dalam pembahasan pokok permasalahan, serta menyampaikan sanggahan terhadap pendapat yang diajukan oleh orang lain.

b. Partisipasi tidak langsung

Partisipasi tidak langsung adalah partisipasi yang dilakukan oleh individu dengan mewakilkan keterlibatannya terhadap suatu kegiatan kepada individu lain.

Jenis partisipasi kemudian dibagi menjadi empat jenis menurut Cohen dan Uphoff dalam Siti Irene A.D (2011,hlmn.61).

- a. Partisipasi dalam pengambilan keputusan, yaitu partisipasi yang berkenaan dengan menentukan solusi pada suatu masalah masyarakat merujuk pada gagasan maupun ide yang menyangkut kepentingan seluruh pihak. Masyarakat dapat melakukan partisipasi berupa kehadiran dalam rapat, diskusi, sumbangan pemikiran atau gagasan, menyampaikan tanggapan atau penolakan terhadap suatu pendapat dan terhadap program yang diajukan untuk mencapai suatu keputusan bersama.
- b. Partisipasi dalam pelaksanaan suatu program, yaitu partisipasi yang dapat dilakukan dengan cara menggerakkan sumber daya manusia, penggalangan dana, dan ikut terlibat dalam kegiatan administrasi, koordinasi dan penjelasan suatu program.
- c. Partisipasi dalam pengambilan manfaat, yaitu partisipasi yang dilakukan dengan menilai manfaat keberhasilan dari pelaksanaan program baik secara kuantitas maupun kualitas.

- d. Partisipasi dalam evaluasi, yaitu partisipasi masyarakat dalam kegiatan evaluasi secara menyeluruh dari pelaksanaan suatu program yang berkaitan dengan pelaksanaan program. Partisipasi evaluasi bertujuan untuk mengetahui ketercapaian suatu program secara menyeluruh terhadap target yang sudah ditetapkan sebelumnya.

2.1.1.3 Fungsi dan Manfaat Partisipasi Masyarakat

Fungsi dari partisipasi masyarakat, Santosa dan Heroepoetri (2005) telah mengkaji terkait hal tersebut dan membaginya kedalam beberapa point penting sebagai berikut :

- a. Partisipasi masyarakat pada sebuah kebijakan
- b. Partisipasi masyarakat pada suatu strategi
- c. Partisipasi masyarakat pada sebuah alat komunikasi
- d. Partisipasi masyarakat pada suatu alat untuk menyelesaikan sengketa
- e. Partisipasi masyarakat pada suatu terapi

2.1.1.4 Bentuk-bentuk Partisipasi Masyarakat

Ericson dalam Slamet (1993) dalam Umboh (2020) menjelaskan bahwa terdapat tiga jenis bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan yaitu:

- a. Partisipasi dalam tahap perencanaan merupakan adanya keterlibatan seseorang dalam penulisan anggaran untuk suatu proyek masyarakat yang memiliki partisipasi aktif.
- b. Partisipasi dalam tahap pelaksanaan yang merupakan keterlibatan seseorang pada pekerjaan sebuah proyek. Masyarakat dapat memberikan beberapa dukungan seperti tenaga, ide, uang atau barang untuk pekerjaan tersebut.
- c. Partisipasi tahap pemanfaatan termasuk pada keterlibatan pada sebuah kegiatan setelah kegiatan tersebut dilakukan.

Konkon dan Suryatna (1978) dalam Chusnah (2008) memberikan tawaran bahwa partisipasi dapat diwadahi dalam :

- a. Buah pikiran, dalam hal ini seperti rapat, diskusi, seminar, pelatihan dan penyuluhan,
- b. Tenaga, seperti gotong royong,
- c. Harta benda dan,

d. Keterampilan

Menurut Normina (2016) dalam Burhanudin (2018) partisipasi masyarakat dalam pendidikan mampu diwujudkan dalam bentuk :

a. **Partisipasi finansial**

Partisipasi finansial adalah bentuk partisipasi yang berkaitan dengan dukungan dana. Dukungan dana tersebut disesuaikan dengan kemampuan masyarakat secara kolektif dalam mendukung kebutuhan dana yang dibutuhkan serta dapat dipertanggungjawabkan pengelolaannya untuk keberhasilan dalam bidang pendidikan.

b. **Partisipasi material**

Partisipasi material dapat dilakukan dengan sumbangan yang berkenaan dengan material atau barang. Material atau barang tersebut diberikan dengan upaya melakukan pemenuhan perlengkapan dasar pendidikan dan penyempurnaan fasilitas seperti untuk membangun sebuah ruang atau tempat kegiatan belajar supaya dapat berjalan dengan baik.

c. **Partisipasi akademik**

Partisipasi akademik adalah bentuk dukungan masyarakat terhadap adanya kepedulian untuk menyelenggarakan pendidikan pada proyek pendidikan yang berkualitas tinggi. Dukungan ini dilakukan dengan cara masyarakat ikut serta dalam mengawasi dan membimbing anak-anak untuk belajar di rumah atau di lingkungan masyarakat secara langsung.

d. **Partisipasi kultural**

Partisipasi kultural adalah bentuk perhatian yang dilakukan oleh masyarakat dalam menjaga nilai dan budaya serta moral yang ada di lingkungan masyarakat antara pendidikan dan budaya yang ada. Partisipasi ini bertujuan agar anak-anak tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan selaras dengan pendidikan.

e. **Partisipasi evaluatif**

Adanya keterlibatan masyarakat pada pengendalian dan pengontrolan terhadap kegiatan pendidikan adalah umpan balik serta penilaian pada kinerja lembaga

pendidikan. Selain itu, masyarakat pun memiliki peran dalam penulisan kurikulum untuk sekolah agar sesuai dengan apa yang dibutuhkan.

2.1.1.5 Faktor-faktor yang mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

Slamet (1993) dalam Umboh (2020) memberikan pendapat bahwa terdapat faktor-faktor yang mampu mempengaruhi partisipasi masyarakat yaitu :

a. Usia

Merupakan faktor yang memberikan pengaruh terhadap sikap pada kegiatan yang ada dalam kemasyarakatan. Kelompok usia menengah ke atas cenderung memiliki ketertarikan terhadap moral dan nilai serta norma yang mantap

b. Jenis kelamin

Dasarnya selalu saja melekat budaya bahwa perempuan tempatnya hanya untuk berkegiatan di dapur saja namun semakin lama peran perempuan di lingkungan masyarakat juga bertambah sebab adanya gerakan emansipasi wanita sehingga kedudukannya semakin baik.

c. Pendidikan

Salah satu dari faktor yang menjadi syarat dalam keikutsertaan untuk berpartisipasi di masyarakat sebab dianggap mampu memberikan pengaruh dalam sikap hidup dan peningkatan dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

d. Pekerjaan dan penghasilan

Pekerjaan dan penghasilan dari seseorang merupakan faktor penentu dalam memberikan kontribusinya pada kegiatan yang ada di lingkungan masyarakat. Oleh sebab itu, dukungan dari faktor ini menjadi penentu dalam mewujudkan tingkat partisipasi yang berkualitas.

2.1.1.6 Tingkat Partisipasi Masyarakat

Menurut Sherry terdapat 8 Tingkat tingkat partisipasi berdasarkan ukuran kekuatan masyarakat dalam memberikan pengaruh perencanaan yaitu sebagai berikut :

a. *Manipulation* (Manipulasi)

Manipulasi adalah tingkat partisipasi masyarakat yang paling rendah, pada tingkatan ini masyarakat hanya diposisikan sebagai pihak yang mengizinkan

suatu program kepada badan penasihat. Keterlibatan masyarakat hanya dijadikan sebagai aksi publisitas oleh pihak berwenang dan tidak diartikan sebagai partisipasi yang tulus dan nyata dari masyarakat.

b. *Theraphy* (terapi/penyembuhan)

Pada tingkatan partisipasi ini masyarakat ikut terlibat dalam kegiatan, namun hanya sebagai alat untuk mendapatkan banyak perhatian dan masukan dari masyarakat demi kepentingan pemerintah. Sebagai contoh masyarakat ikut dilibatkan oleh para ahli dalam proses penyembuhan suatu terapi, namun pada intinya masyarakat hanya digunakan sebagai kedok agar terlihat ikut berpartisipasi dalam kegiatan.

c. *Informing* (informasi)

Tingkatan partisipasi ini memposisikan masyarakat hanya sebagai penerima informasi saja terkait suatu program yang telah direncanakan oleh pemerintah. Masyarakat akan diberikan informasi terkait hak-hak, tanggung jawab, dan berbagai pilihan. Namun pemerintah dan pemegang kekuasaan hanya memberikan informasi satu arah kepada masyarakat tanpa adanya ruang bagi masyarakat untuk memberikan tanggapan dan kesempatan negosiasi dari masyarakat. Pada situasi ini masyarakat hanya mendapatkan informasi di akhir perencanaan dan sedikit kesempatan bagi masyarakat untuk ikut terlibat dalam menyusun rencana.

d. *Consultation* (konsultasi)

Pada tingkat partisipasi ini pemerintah atau pemegang kewenangan akan menggiring opini masyarakat setelah penyampaian informasi kepada mereka. Pada tahap ini merupakan langkah penting untuk mendapatkan partisipasi yang maksimal dari masyarakat. Walaupun pada tingkatan ini telah terbangun dialog dua arah antara pemerintah dengan masyarakat, namun tidak menjadi jaminan kepedulian dan ide masyarakat akan diperhatikan. Salah satu metode konsultasi yang sering dilakukan adalah dengan cara survei, pertemuan lingkungan masyarakat, dan sesi penyampaian pendapat dari masyarakat.

e. *Placation* (penentraman/perujukan)

Masyarakat mulai diakui keberadaannya walaupun terdapat beberapa hal yang ditentukan oleh pihak atau orang dengan kekuasaan tertentu.

f. *Partnership* (kerjasama)

Pada tingkat ini, telah terbentuk kesamaan kepentingan antara masyarakat dan pemegang kekuasaan. Masyarakat akan ikut memegang kekuasaan atas kesepakatan bersama, berbagi dengan pemegang kekuasaan sesungguhnya. Pada tingkatan ini telah disepakati bahwa tanggung jawab dalam perencanaan dan pembuatan keputusan serta pemecahan masalah merupakan tugas dari masyarakat dan pemegang kekuasaan.

g. *Delegated Power* (pelimpahan kekuasaan)

Masyarakat yang mengikuti program akan diberikan sebuah tanggungjawab dalam pengambilan keputusan yang lebih dominan sebab pemilik kekuasaan wajib melakukan kegiatan tawar menawar dengan masyarakat dan tidak mendapatkan hak untuk memberikan tekanan dari atas.

h. *Citizen Control* (kontrol masyarakat)

Partisipasi masyarakat masuk kedalam tingkatan yang cukup tinggi dimana masyarakat memiliki kekuatan dalam mengataur kelembagaan yang berhubungan dengan kepentingan golongan tertentu.

Partisipasi masyarakat berkaitan erat dengan sebuah kekuatan maupun hak yang diutamakan dalam pengambilan sebuah keputusan untuk dilakukan yahapan identifikasi masalah, pemecahannya sampai dengan kegiatan terlaksana di lapangan (Panudju, 1999).

2.1.1.7 Prinsip-prinsip Partisipasi Masyarakat

Prinsip partisipasi sebagaimana tertuang pada Panduan Pelaksanaan Pendekatan Partisipatif yang disusun oleh *Department for International Development (DFID)* dalam Monique Sumampouw (2004, hlm.106-107) sebagai berikut:

- a. Cakupan. Semua yang terlibat dari suatu anggota tertentu dengan pengaruh dari suatu hasil pada proses pembangunan proyek.

- b. Kesetaraan dan kemitraan. Seseorang mempunyai kemampuan dalam menggunakan prakarasa yang tidak memperhitungkan jenjang maupun struktur tertentu untuk masing-masing pihak.
- c. Transparansi. Seluruh pihak harus mampu menumbuhkembangkan komunikasi serta iklim komunikasi terbuka dan kondusif sehingga dapat menimbulkan dialog.
- d. Kesetaraan kewenangan. Berbagai pihak yang ada harus mampu menyeimbangkan distribusi kewenangan serta kekuasaan untuk menghindari adanya dominasi.
- e. Kesetaraan tanggung jawab. Berbagai pihak memiliki tanggung jawab yang jelas pada setiap proses sebab adanya kesetaraan kewenangan serta adanya keterlibatan pada proses pengambilan keputusan dan langkah selanjutnya.
- f. Pemberdayaan. Keterlibatan berbagai pihak tidak terlepas dari adanya kekuatan serta kelemahan yang dimilikinya sehingga melalui adanya keterlibatan aktif pada proses kegiatan akan terjadi sebuah proses saling belajar dan saling memberdayakan satu dengan lainnya.
- g. Kerjasama. Diperlukan adanya prinsip kerja sama antar berbagai pihak yang ada guna berbagi kelebihan untuk mengurangi berbagai kelemahan yang ada khususnya pada kemampuan sumber daya manusia.

2.1.2 Pengertian Anak Yatim Piatu

Menurut pengertian syariat, seorang anak yatim adalah seorang anak yang belum baligh yang ditinggalkan oleh ayahnya karena telah meninggal dunia. Sedangkan seorang anak piatu adalah seorang anak yang belum baligh yang ditinggalkan oleh ibunya karena telah meninggalkan dunia.

Menurut Zakiyuddin (2007,hlm.13), kata yatim adalah bentuk jamak dari kata yatama. Menurut Departemen Agama RI, yatim adalah anak yang ayahnya telah meninggal dunia, dan masih kecil (belum mencapai usia dewasa). Jadi pengertian anak yatim disini tidak menyempit pada anak yang sudah ditinggal meninggal oleh ayahnya melainkan mencakup semua anak yang terlantar dan tidak mengetahui garis keturunannya dan merasakan kesulitan kehidupan yang sama.

2.1.3 Pengertian Pendidikan

Berkenaan dengan makna pendidikan, Abuddin Nata mengatakan bahwa pendidikan islam adalah sebuah kegiatan yang dilakukan dengan sadar untuk embina kepribadian seseorang (Nata, 2011,hlm.340).

Pendidikan adalah sebuah kegiatan yang dilakukan untuk dilakukan perencanaan dalam mempersiapkan orang-orang dalam memahami, mengenalkan dan menghayati ajaran agam islam dari sumber yang valid yaitu Al-Quran dan hadist (Ramayulis, 2005,hlm.21).

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian yang relevan, penelitian yang relevan menjadikan sebuah acuan bagi penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Beberapa penelitian yang relevan mendasari penelitian ini antara lain:

- a. Al Ummemi (2014) dengan judul **“Partisipasi Masyarakat Dalam Menyantuni Anak Yatim Di Desa Sungai Jalau Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar”** Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Pekanbaru. Partisipasi merupakan sebuah peran yang dilakukan untuk menanggulangi sebuah masalah yang terjadi dengan menyangkutkan pada keberhasilan dan kebutuhan dari orang banyak dimana partisipasi ini bukan sekedar pemikiran maupun perasaan akan tetapi juga tentang tindakan yang dapat dilakukan. Hasil yang ingin diraih dari adanya partisipasi masyarakat dalam memberikan partisipasinya untuk menyantuni anak yatim adalah dengan menciptakan iklim pendidikan yang bermanfaat bukan bagi diri sendiri namun juga menjadi bekal saat menuju dewasa. Teknik pengumpulan data dalam penelitian menggunakan kegiatan wawncara dan observasi serta dokumentasi dengan mengandalkan metode deskriptif kualitatif seperti adanya kata-kata yang tertulis dan lisan dengan sumber dari orang maupun responden yang menjadi sasaran pengamatan.
- b. Herwin Herwin, dkk (2019) dengan judul **“Persepsi Masyarakat Terhadap Pendidikan Anak Yatim di Kecamatan Balusu Kabupaten Barru”**. Penelitian ini mengkaji tentang Persepsi Masyarakat Terhadap Pendidikan

Anak Yatim Di Kecamatan Balusu Kabupaten Barru. Masalah yang dikaji dalam skripsi ini adalah untuk menelaah mengenai interaksi yang dilakukan oleh masyarakat dalam partisipasinya pada pendidikan Anak Yatim Piatu. Jenis penelitian termasuk pada deskriptif kualitatif dengan informan yang dilakukan secara *purposive sampling* berdasar pada karakteristik responden itu sendiri. Hasil yang diperoleh adalah masyarakat mampu mengembangkannya kemampuan Anak Yatim Piatu melalui dukungannya pada pendidikan sehingga diharapkan mampu membentuk watak dan sikap yang baik demi peradaban bangsa dengan tetap menjunjung tinggi keimanan dan ketaqwaan terhadap Allah SWT.

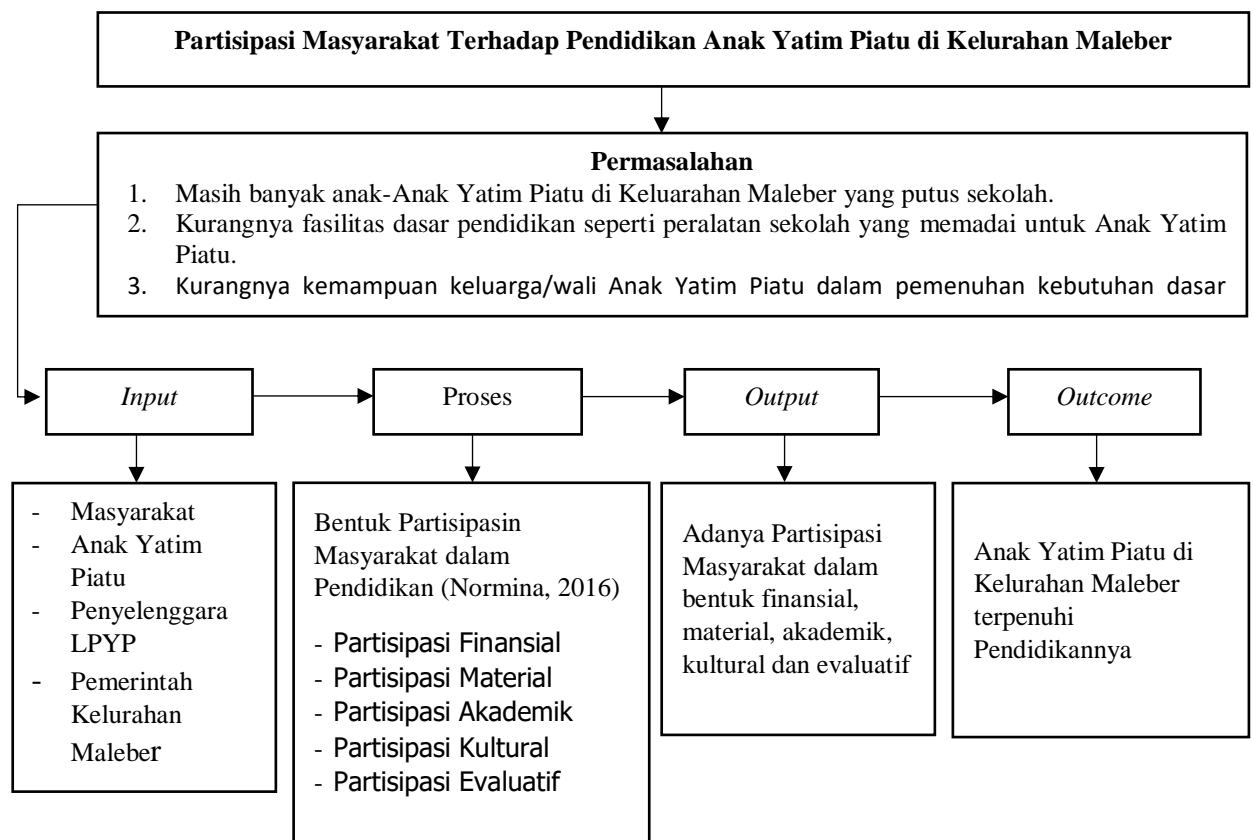
- c. Retnaningsih (2021) dengan judul jurnal “**Perlindungan Sosial dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak Yatim Piatu Korban Pandemi Covid-19**”. Pandemi ini memiliki pengaruh yang sangat signifikan sehingga banyak anak terlantar dikarenakan orang tua yang meninggal dan tidak mampu untuk melanjutkan hidup dengan layak. Maka dari itu, penelitian ini menekankan pada penyelamatan generasi bangsa yang memiliki dampak dari adanya wabah Covid-19 dengan latar belakang keluarga dengan kategori kurang mampu yang masih harus mendapatkan hak untuk melanjutkan pendidikannya sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang.
- d. Ramadhanty (2021) dengan judul jurnal “**Berbagi Bersama Pada Masa Pandemi Di Yayasan Yatim Piatu dan Dhuafa Rumah Harapan**”. Universitas Muhammadiyah Jakarta, program pada kegiatan yang dilakukan di masyarakat dengan tujuan untuk memberikan bantuan dalam memberikan kesadaran tentang pentingnya protokol kesehatan dan sikap nasionalisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- e. Hidayat (2021) dengan judul jurnal “**Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Anak Yatim dan Dhuafa di Yogyakarta**”. Penelitian ini memberikan penekanan pada proses serta hasil pemberdayaan maupun peningkatan untuk kesejahteraan anak yatim di Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara dimana hasil yang diperoleh adalah proses pemberdayaan pada

Anak Yatim Piatu dan dhuafa meningkatkan kesejahteraan di Panti Asuhan La Tahzan dengan adanya program kewirausahaan.

- f. Andi Uceng, dkk (2019) dengan judul jurnal “**Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan Sumber Daya Manusia di Desa Cemba Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang**”. Penelitian ini bertujuan mengetahui tingkat dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan sumber daya manusianya dan menganalisis tingkat partisipasi yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan *simple random sampling* dengan teknik observasi dan wawancara sehingga diperoleh hasil bahwa tingkat partisipasi masyarakatnya termasuk dalam kategori kurang baik dan tidak berpengaruh secara signifikan pada peningkatan kualitas sumber daya.
- g. Makhmudi Dyah, dkk (2018) dengan judul jurnal “**Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Prasarana Lingkungan pada Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) di Kelurahan Tambakrejo Kota Semarang**”. Partisipasi seseorang yang mengikuti kegiatan masyarakat di luar pelaksanaan adalah orang yang tergabung dalam suatu kelompok sosial dan terlibat dalam acara masyarakat yang sedang berlangsung. Suatu program pembangunan memerlukan keterlibatan masyarakat karena pelaksanaan program bergantung pada keterlibatan masyarakat. Karena hasil BKM yang positif, Kecamatan Tambakrejo menjadi salah satu kecamatan di Kota Semarang yang melaksanakan program PLPBK (Pengelolaan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas). Mengetahui bagaimana keterlibatan masyarakat dalam program PLPBK pada pembangunan infrastruktur lingkungan Desa Tambakrejo menjadi tujuan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner kepada 87 partisipan serta melakukan observasi, wawancara, dan evaluasi dokumen. Masyarakat berkontribusi dalam bentuk uang, barang, tenaga, dan gagasan. Masyarakat mendapat pemberitahuan mengenai pembuatan prasarana lingkungan hidup dalam program PLPBK, yang menunjukkan adanya pemberitahuan pada tingkat partisipasi masyarakat.

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini didasarkan pada rumusan masalah mengenai bagaimana partisipasi masyarakat terhadap pendidikan Anak Yatim Piatu dengan analisa teori partisipasi masyarakat. Berikut kerangka konseptual dalam penelitian ini yang berisikan *Input*, *Proses*, *Output*, dan *Outcome*.



Gambar 2.1. Kerangka Konseptual

2.4 Pertanyaan Penelitian

Bagaimana partisipasi masyarakat dalam hal memberi bantuan pendidikan terhadap Anak Yatim Piatu?